



## ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN DI JEPANG, FINLANDIA, CHINA DAN INDONESIA DALAM MENDUKUNG *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Oleh

<sup>1</sup>Abd. Qadir Muslim; <sup>2</sup>I Gede Sedana Suci; <sup>3</sup>Muhammad Rizki Pratama

<sup>1</sup><sup>3</sup>Universitas Brawijaya; <sup>2</sup>Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar;

<sup>1</sup>[qadirmuslim@ub.ac.id](mailto:qadirmuslim@ub.ac.id); <sup>2</sup>[sedanasuci@uhnsugriwa.ac.id](mailto:sedanasuci@uhnsugriwa.ac.id); <sup>3</sup>[pratamarizkim@ub.ac.id](mailto:pratamarizkim@ub.ac.id)

Diterima 4 September 2021, direvisi 20 September 2021, diterbitkan 1 Oktober 2021

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang mendukung SDGs pendidikan berkualitas di beberapa negara dan juga untuk memberikan solusi bagi kebijakan pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan SDGs pendidikan berkualitas. Metode yang digunakan yaitu *library research* dengan mengambil referensi dari buku, website, dan jurnal internasional. *Sustainable Development Goals* atau yang biasa disingkat SDGs merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan yang dihasilkan dari KTT PBB pada tahun 2012. Salah satu dari 17 tujuan yang dihasilkan yaitu mengenai pendidikan berkualitas. Untuk mendukung pendidikan berkualitas di semua negara tentu diperlukan sebuah kebijakan pendidikan. Beberapa negara seperti Jepang, Finlandia, Cina, dan Indonesia telah menunjukkan adanya kebijakan pendidikan yang diterbitkan untuk mendukung SDGs pendidikan berkualitas. Jepang membuktikan kebijakan yang mendukung SDGs dengan diberlakukannya pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, lalu Jepang juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan kebutuhan khusus. Di Finlandia, SDGs telah menjadi salah satu dari tujuh topik yang ditekankan dalam kurikulum inti untuk pendidikan dasar. Kebijakan pendidikan di China adalah berupaya mengarahkan fungsi pendidikan menuju sumber daya masyarakat dan individu, dan menumbuhkan kualitas pendidikan kewarganegaraan. Di Indonesia kebijakannya untuk peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, dan memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter.

**Kata Kunci : Kebijakan, Pendidikan, SDGs.**

### Abstract

*This research aims to find out educational policies that drive the SDGs of quality education in several countries and to provide solutions for education policies in Indonesia related to the SDGs of quality education as well. The method employed is library research by taking references from books, websites, and international journals. The Sustainable Development Goals (SDGs) are sustainable development goals that produced from the United Nations Summit in 2012. One of the 17 goals enacted is about quality education. To support quality education in all countries, of course, an education policy is needed. Several countries such*



*as Japan, Finland, China, and Indonesia have shown the existence of educational policies issued to support the SDGs of quality education. Japan has proven policies that support the SDGs with the implementation of free education from early childhood education to higher education, then Japan is also making efforts to improve special needs education. In Finland, the SDGs have become one of the seven topics emphasized in the core curriculum for basic education. China's education policy is to seek to direct the educational function towards community and individual resources, and cultivate the quality of civic education. In Indonesia, the policy is to improve the accessibility and quality of education, improve the quality of educators and educational support facilities, improve educational services, and strengthen and also develop character education-based.*

**Keywords: Public Policy, Education, SDGs**

## I. PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap manusia di seluruh dunia. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dalam pasal 1 menyebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. (UU RI No 20 Thn 2003, 2003)

Karena itu, pendidikan adalah usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta didik untuk memiliki kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan juga untuk masyarakat melalui proses pembelajaran. Tiri et al. (2016) berpendapat bahwa pendidikan lebih dari sekedar memperoleh pengetahuan atau meningkatkan kapasitas kognitif untuk mengembangkan seluruh pribadi, termasuk emosi, motivasi, kemauan, kerohanian, dan sosialitas. Pendidikan dapat berkontribusi pada makna hidup dengan meningkatkan kondisi kehidupan orang (materi), sehingga memfasilitasi untuk menemui makna dalam kehidupan (Schinkel et al., 2016). Dalam penerapan pendidikan di kehidupan, tentu dibutuhkan suatu kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah dan kebijakan tersebut dinamakan kebijakan pendidikan.

Bell & Stevenson, (2006) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan merupakan salah satu agenda bagi pemerintah di seluruh dunia. Kebijakan pendidikan adalah suatu kumpulan hukum atau aturan-aturan yang mengatur tentang pelaksanaan sistem pendidikan yang dijalankan dalam sebuah lembaga pendidikan sebagai sebuah perencanaan untuk memandu pengambilan keputusan agar tujuan dari pendidikan yang diinginkan dapat terwujud. Kebijakan pendidikan memiliki dua fungsi diantaranya yaitu sebagai penyedia akuntabilitas atau kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap norma budaya yang menurut pemerintah perlu diadakan dalam pendidikan, serta melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru. Viennet and Pont, (2017) memberi definisi kebijakan pendidikan adalah program yang dikembangkan oleh otoritas publik, diinformasikan oleh nilai-nilai dan ide-ide, diarahkan ke aktor-aktor pendidikan dan dilaksanakan oleh administrator dan profesional



pendidikan.

Permasalahan kebijakan pendidikan negara berkembang seperti Indonesia masih menjadi hambatan seperti keadilan, kualitas keseluruhan hasil pembelajaran dan lingkungan sekolah dan pembelajaran, atau kapasitas sistem untuk mempersiapkan siswa untuk masa depannya, pendanaan, tata kelola yang tidak efektif atau mekanisme evaluasi dan penilaian. Seharusnya Kebijakan pendidikan dapat merujuk pada program yang memengaruhi sistem pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga pendidikan tersier.

Menurut Jie (2016) kebijakan pendidikan memiliki kerangka yang berfokus pada konten, konteks, proses, dan aktor. Aktor merupakan individu atau anggota kelompok atau organisasi yang dipengaruhi oleh konteks di mana mereka tinggal dan bekerja. Konteks dipengaruhi oleh banyak faktor seperti ketidakstabilan atau ideologi, oleh sejarah dan budaya. Proses dipengaruhi oleh posisi aktor dalam struktur kekuasaan, nilai-nilai dan harapan aktor.

Dalam perumusan kebijakan pendidikan yang diterbitkan tentu banyak dipengaruhi oleh berbagai macam instrumen. Pemerintah harus memilah dan memilih mana instrumen yang sesuai untuk kebijakan pendidikan yang akan diterapkan. Namun, akhir-akhir ini dunia tengah diperkenalkan dengan suatu pengetahuan baru yang bernama *Sustainable Development Goals*.

Konsep SDGs (*Sustainable Development Goals*) berasal dari definisi yang diberikan oleh Perdana Menteri Norwegia Gro Harlem Brundtland dalam laporan "*Our Common Future*" pada tahun 1987 yang mengungkapkan masalah pertumbuhan masyarakat tentang keterbatasan sumber daya dan distribusinya. Berbagai inisiatif telah diambil untuk masalah itu contohnya yaitu dalam KTT Rio 1992 dan KTT Millenium 2000 dan masih belum terpecahkan. Namun pada KTT PBB 2012 yang dilaksanakan di Rio tentang *Sustainable Development Goals*, PBB mengambil inisiatif merumuskan 17 tujuan SDGs yang disetujui pada tahun 2015 dan mulai berlaku pada 1 Januari 2016 dengan tujuan untuk mencapainya dalam lima belas tahun. Peta jalan ini dikenal sebagai Agenda 2030 yang mencakup 128 tujuan "rencana aksi untuk manusia, planet dan kemakmuran juga berupaya memperkuat perdamaian universal dalam kebebasan yang lebih besar (Otero & Torres, 2018)

Tujuh belas tujuan global dari SDGs diantaranya : 1) mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuknya dimana-mana; 2) mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi dan mempromosikan pertanian berkelanjutan; 3) memastikan kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan untuk semua usia; 4) memastikan inklusif dan pendidikan berkualitas yang adil dan mempromosikan kesempatan belajar seumur hidup untuk semua; 5) mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan; 6) memastikan ketersediaan dan pengelolaan air dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua; 7) memastikan akses terjangkau, andal, energi berkelanjutan dan modern untuk semua; 8) mempromosikan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, inklusif, pekerjaan penuh dan produktif, dan

pekerjaan yang layak untuk semua; 10) mengurangi ketidaksetaraan di dalam dan di antara negara- negara; 11) menjadikan kota dan pemukiman manusia inklusif, aman, Tangguh, dan berkelanjutan; 12) pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan; 13) mengambil tindakan mendesak untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya; 14) melestarikan dan menggunakan sumber daya laut secara berkelanjutan; 15) melindungi, memulihkan, dan mempromosikan keberlanjutan penggunaan ekosistem terestrial, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi penggurunan, dan menghentikan dan membalikkan degradasi lahan dan menghentikan hilangnya keanekaragaman hayati; 16) mempromosikan masyarakat yang damai dan inklusif, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga yang efektif, bertanggung jawab dan inklusif di semua tingkatan; dan yang terakhir yaitu 17) memperkuat cara implementasi dan merevitalisasi kemitraan global (Bolton, 2021)



Gambar 1. Ruang Lingkup SDGs  
Sumber: United Nations (2021)

Gambar tersebut menunjukkan konsep SDGs terdapat poin yang berhubungan dengan pendidikan, yaitu di poin ke empat tentang “pendidikan berkualitas”. Poin tersebut perlu kita jadikan perhatian khusus dalam mengembangkan kebijakan pendidikan di suatu negara karena konsep SDGs merupakan konsep yang mendunia. Alangkah lebih baiknya jika suatu kebijakan pendidikan didasarkan pada poin tersebut. Maka dari itu tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pendidikan yang mendukung konsep *Sustainable Development Goals* pendidikan berkualitas dari beberapa negara, khususnya negara berkembang.

## II. METODE

Pendekatan penelitian yang dijadikan dasar dalam penelitian ini adalah kualitatif



yang berlandaskan pada paham *post positivisme* yaitu memiliki sifat eksploratif (Kothari, 2004). Metode yang digunakan adalah *library research*. Dengan metode analisis dokumen dilakukan dengan teknik kompilasi dan manipulasi statistik, referensi dan panduan abstrak, serta analisis konten (Williams, 2007), yaitu dengan melakukan kompilasi dan mencari referensi dari buku, *website*, dan jurnal internasional terkait dengan kebijakan-kebijakan yang mendukung *Sustainable Development Goals*.

### III. PEMBAHASAN

#### ***Sustainable Development Goals* “Pendidikan Berkualitas”**

Agenda PBB 2030 didasarkan pada perjanjian HAM internasional yang sudah lama ada, dan SDGs pendidikan berkualitas secara khusus didasarkan pada Konvensi Hak-Hak Anak (CRC; PBB, 1989). CRC menetapkan bahwa pendidikan yang berkualitas harus fokus pada (a) pengembangan kepribadian, bakat, dan kemampuan mental dan fisik anak hingga potensi penuh mereka; (b) pengembangan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan kebebasan mendasar, dan untuk prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Piagam PBB; (c) perkembangan rasa hormat kepada orang tua anak, identitas budayanya sendiri, bahasa dan nilai-nilai, untuk nilai-nilai nasional negara di mana anak itu tinggal, negara dari mana ia berasal, dan untuk peradaban berbeda dengan miliknya sendiri; (d) persiapan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang bebas, dalam semangat pemahaman, perdamaian, toleransi, kesetaraan jenis kelamin, dan persahabatan di antara semua orang, kelompok etnis, nasional dan agama dan orang-orang asli; dan (e) pengembangan rasa hormat terhadap lingkungan alam (Nolet, 2017).

Sayangnya, kualitas pendidikan yang diterima anak-anak sangat bervariasi di seluruh dunia dan bergantung langsung pada berbagai faktor, termasuk jenis kelamin, ras, usia, status sosial ekonomi, identitas seksual, dan tentu saja di mana seseorang tinggal. Anak-anak di negara-negara yang sebelumnya terjajah dan kurang berkembang di daerah selatan cenderung memiliki sedikit akses ke pendidikan berkualitas dibandingkan dengan anak-anak di negara-negara kaya dan maju di daerah utara. Hampir 40% anak-anak di dunia menerima pendidikan yang tidak memadai untuk mempelajari keterampilan membaca dan matematika dasar. Pada 2013 (tahun terakhir yang datanya tersedia), 59 juta anak usia sekolah dasar tidak bersekolah di seluruh dunia. Di seluruh dunia, anak perempuan cenderung putus sekolah dengan tingkat yang lebih tinggi daripada anak laki-laki. Dua pertiga dari 757 juta orang dewasa di seluruh dunia yang tidak dapat membaca dan menulis adalah wanita (Nolet, 2017). Di semua negara memiliki kesenjangan ras/etnis yang signifikan, contohnya tingkat kelulusan untuk siswa berkulit hitam, hispanik, amerika indian, dan asli alaska lulus pada tingkat yang jauh lebih rendah daripada siswa kulit putih.



Gambar 2. Pendidikan dalam SDGs  
Sumber: United Nations (2021)

Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan yang muncul di setiap tujuan, setiap tujuan dari SDGs memiliki kerangka kerja indikator global tersendiri. Untuk tujuan ke empat yaitu pendidikan berkualitas, memiliki kerangka kerja indikator global yang dikembangkan oleh *Inter-Agency* dan kelompok ahli yang disetujui pada sesi ke-47 Komisi Statistik PBB yang diadakan pada Maret 2016. Kerangka kerja global tersebut memiliki target dan juga indikator sebagai berikut yang dikutip dari United Nations (2021):

Tabel 1. Target dan Indikator SDGs

Target	Indikator
4.1 Pada tahun 2030, pastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang gratis, adil dan berkualitas yang mengarah pada hasil pembelajaran yang relevan dan efektif	4.1.1 Proporsi anak-anak dan remaja: (a) di kelas 2/3; (b) pada akhir primer; dan (c) pada akhir sekolah menengah pertama yang mencapai setidaknya tingkat kemahiran minimum dalam (i) membaca dan (ii) matematika, berdasarkan jenis kelamin
4.2 Pada tahun 2030, pastikan bahwa semua anak perempuan dan laki-laki memiliki akses ke pengembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan pendidikan pra-sekolah dasar	4.2.1 Proporsi anak-anak di bawah usia 5 tahun yang secara perkembangan berada di jalur kesehatan, pembelajaran dan kesejahteraan psikososial, berdasarkan jenis kelamin



sehingga mereka siap untuk pendidikan dasar	4.2.2 Tingkat partisipasi dalam pembelajaran terorganisir (satu tahun sebelum usia masuk utama resmi), berdasarkan jenis kelamin
4.3 Pada tahun 2030, memastikan akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki ke pendidikan teknis, kejuruan dan tersier yang terjangkau dan berkualitas, termasuk universitas	4.3.1 Tingkat partisipasi pemuda dan orang dewasa dalam pendidikan dan pelatihan formal dan non- formal dalam 12 bulan sebelumnya, berdasarkan jenis kelamin
4.4 Pada tahun 2030, secara substansial tingkatan jumlah pemuda dan orang dewasa yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan teknis dan kejuruan, untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan kewirausahaan	4.4.1 Proporsi pemuda dan orang dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berdasarkan jenis keterampilan
4.5 Pada tahun 2030, hilangkan kesenjangan gender dalam pendidikan dan pastikan akses yang sama ke semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan bagi mereka yang rentan, termasuk para penyandang cacat, masyarakat adat dan anak-anak dalam situasi rentan	4.5.1 Indeks paritas (perempuan/laki- laki, pedesaan/perkotaan, kekayaan bawah/atas dan lain- lain seperti status disabilitas, masyarakat adat dan yang terkena dampak konflik, ketika data tersedia) untuk semua indikator pendidikan dalam daftar ini yang dapat dipilah- pilah
4.6 Pada tahun 2030, pastikan bahwa semua remaja dan sebagian besar orang dewasa, baik pria maupun wanita, mencapai melek huruf dan berhitung	4.6.1 Presentase populasi dalam kelompok usia tertentu yang mencapai setidaknya tingkatan kemahiran yang tetap dalam fungsional (a) melek huruf dan (b) keterampilan berhitung, berdasarkan jenis kelamin



4.7 Pada tahun 2030, pastikan bahwa semua peserta didik memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk mempromosikan pembangunan berkelanjutan, termasuk antara lain melalui pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup berkelanjutan, hak asasi manusia, kesetaraan gender, promosi budaya perdamaian dan	4.7.1 Sejauh mana (i) pendidikan kewarganegaraan global dan (ii) pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan, termasuk kesetaraan gender dan hak asasi manusia, diarusutamakan pada semua tingkatan dalam: (a) kebijakan pendidikan nasional, (b) kurikulum, (c) pendidikan guru dan (d) penilaian siswa
--	---

Sumber: United Nations (2021)

Dalam memahami pendidikan berkualitas Boeren (2019) memiliki pendapat bahwa terdapat tiga perspektif yang bisa digunakan yaitu perspektif mikro, meso, dan makro. Orang tua, anak-anak, remaja dan pelajar dewasa adalah aktor kunci di tingkat mikro karena merekalah yang muncul dalam statistik partisipasi, mereka adalah aktor yang paling relevan dalam wacana kebijakan yang didukung oleh tolok ukur dan indikator, dan mereka diharapkan memperoleh tingkat pengetahuan dan keterampilan yang tinggi untuk beroperasi dalam ekonomi global. Namun, tidak semua orang memiliki peluang yang sama dalam hidup untuk sukses dalam pendidikan, penelitian telah menunjukkan bahwa ada perbedaan besar tergantung pada karakteristik sosial-ekonomi dan sosial-demografi keluarga. Sehingga, perspektif mikro biasanya merujuk pada faktor sosio-demografis dan sosial ekonomi, sikap, kepercayaan diri, minat, dan motivasi orang untuk belajar.

Proses pembelajaran dapat terjadi di berbagai tempat, termasuk sekolah, perguruan tinggi, dan tempat kerja. Ketersediaan pembelajaran yang berkualitas tinggi sangat penting untuk hasil pendidikan yang baik, seperti yang diperdebatkan oleh Helen O'Sullivan dan John West-Burnham. Karena hal tersebut tentu diperlukan guru, pendidik, manajer, dan staf pendukung berkualitas tinggi yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didik dan untuk mengembangkan profesional mereka sendiri di dalam lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan tersebutlah yang merupakan alat tingkat meso untuk menerjemahkan kebijakan pendidikan ke dalam proses pembelajaran. Tanpa interaksi antara tingkat mikro dan meso tidak mungkin pembelajaran berkualitas tinggi akan terjadi. Terdapat tiga komponen yang mencirikan perspektif meso yaitu struktur penawaran yang tersedia di institusi; cara-cara di mana pembelajaran dan praktik pedagogis diorganisasikan; dan tingkat kualifikasi anggota staf (Boeren, 2019).

Terlepas dari pentingnya tingkat meso, kegiatan di sekolah juga perlu berkaitan dengan berbagai perturan dan perundang-undangan karena setiap negara memiliki kebijakan pendidikan sendiri-sendiri yang harus diikuti. Contohnya termasuk kebutuhan untuk mengikuti serangkaian persyaratan untuk memberikan kualifikasi standar dan





diakui secara resmi, atau untuk menerima pendanaan Dengan demikian, interaksi antara tingkat meso dan makro juga penting. Singkatnya, faktor-faktor tingkat makro cenderung berhubungan dengan aturan dan peraturan hukum dan keuangan, sistem pendidikan menyeluruh yang berlaku di suatu negara atau wilayah yang mengalami devolusi, dan ideologi sosial-politik dari negara atau wilayah tersebut karena berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh para sarjana menunjukkan bahwa negara dengan tingkat demokrasi, kepercayaan politik, dan keadilan sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat partisipasi pendidikan yang lebih kuat.

Ada pendekatan yang dapat digunakan guru di tingkat kelas dan sekolah untuk memberlakukan visi pendidikan berkualitas menurut Nolet (2017) yaitu : 1) melaksanakan praktik-praktik pendidikan yang responsif secara budaya; dan 2) membantu siswa mengembangkan pandangan dunia yang berkelanjutan tentang pendidikan. Ada banyak literatur yang menggambarkan praktik-praktik yang responsif secara budaya.

Pendidikan yang responsif secara budaya mengidentifikasi dan memelihara kekuatan budaya yang unik pada setiap siswa. Ini melibatkan berbagai strategi dan pendekatan yang menghubungkan pengetahuan budaya siswa, pengalaman sebelumnya, dan gaya pribadi dengan pengetahuan akademik. Pendidikan yang responsif secara budaya melegitimasi apa yang sudah diketahui siswa dan mempromosikan prestasi siswa serta rasa kesejahteraan tentang tempat budaya di dunia.

Pandangan dunia adalah kombinasi unik dari perspektif, nilai, pengetahuan, dan kepercayaan yang menentukan cara seseorang melihat, menafsirkan, dan berinteraksi dengan dunia (Nolet, 2017). Pandangan dunia yang berkelanjutan tentang pendidikan mendukung pelajar untuk mempersiapkan mereka untuk terlibat secara efektif dengan kompleksitas, ketegangan, dan ketidakpastian yang terkait dengan menciptakan ruang yang aman dan adil bagi manusia dan spesies lain saat ini dan masa depan. Penerapan pandangan dunia dapat dilihat pada hal-hal yang dikatakan, pilihan yang dibuat, dan cara berperilaku sehari-hari dari menit ke menit. Ketika dua pendekatan ini dikombinasikan, mereka dapat membantu guru menciptakan lingkungan kelas di mana semua memiliki kesempatan untuk menghubungkan pembelajaran dengan pengalaman mereka sebelumnya, pengetahuan budaya, dan gaya kinerja.

Berikut ini terdapat beberapa strategi pengajaran untuk menggabungkan dua pendekatan ini. Pertama yaitu komunikasikan harapan yang tinggi untuk semua siswa. Langkah yang dilakukan yaitu menetapkan niat belajar yang jelas dan kemudian menciptakan kegiatan yang membantu siswa memantau dan merefleksikan keinginan mereka menuju pencapaian tujuan-tujuan tersebut. Memberi tahu setiap siswa bahwa guru mengharapkan mereka untuk terlibat dalam kinerja tingkat tinggi dan guru akan mendukung mereka untuk upayanya. Ciptakan kondisi yang mengkomunikasikan rasa hormat yang tulus kepada siswa dan keyakinan pada kemampuan dan kapasitas mereka.



Kedua, ciptakan peluang bagi guru dan siswa untuk mengeksplorasi nilai dan keyakinan secara terbuka. Sebelum mengajar siswa, guru perlu memahami sistem hukuman struktural yang beroperasi pada tingkat masyarakat, dan menganalisis dan merefleksikan bias dan prasangka guru sendiri (Taylor et al., 2019). Guru harus mengenali keanggotaan mereka sendiri dalam berbagai kelompok dalam masyarakat dan mengakui manfaat dan kerugian dari keanggotaan tersebut. Berikan kesempatan yang sering bagi siswa untuk menyelidiki dan menguji asumsi, bias, kepercayaan, dan prakonsepsi mereka sendiri. Mereka harus terus menilai dan menyesuaikan pandangan dunia mereka sendiri yang berkembang ketika mereka mengembangkan pemahaman dan pengalaman yang lebih dalam.

Bantu siswa memperjelas nilai-nilai mereka sendiri, memahami nilai-nilai orang lain, dan menyelidiki nilai-nilai yang mendasari pandangan dunia yang berkelanjutan. Guru perlu membantu mereka menyelidiki bidang-bidang di mana nilai-nilai mereka sendiri bertepatan atau bertentangan dengan nilai-nilai sosial yang lebih luas atau nilai-nilai yang terkait dengan menciptakan ruang yang aman dan adil untuk sekarang dan di masa depan. Menciptakan lingkungan yang aman di mana siswa dapat mengeksplorasi dan mendiskusikan masalah yang berkaitan dengan ras, kelas, jenis kelamin, identitas, peluang, dan hak istimewa secara terbuka.

Guru dapat menciptakan pengaturan semacam ini dengan terlebih dahulu mengembangkan pemahaman tentang diri mereka sebagai makhluk budaya yang kritis. Menciptakan lingkungan yang aman membutuhkan penetapan norma, prosedur, dan struktur yang jelas yang mengkomunikasikan nilai-nilai inklusi dan harapan niat positif. Ketika lingkungan yang aman dan mendukung telah dibuat, kemungkinan besar siswa akan dapat mengidentifikasi, mengklarifikasi, dan menyelidiki nilai-nilai mereka sendiri dan nilai-nilai orang lain (Nolet, 2017).

Ketiga, gunakan pendekatan yang berpusat pada peserta didik. Belajarlah untuk menggunakan strategi yang sangat kolaboratif, aktif, partisipatif, dan berpusat pada peserta didik dan yang mendukung siswa dalam eksplorasi masalah dunia nyata. Pembelajaran semacam ini dapat dipromosikan dengan berbagai pendekatan yang berpusat pada pembelajar di mana peran guru bergeser dari pengantar konten ke fasilitator pembelajaran, dan peserta didik memikul tanggung jawab yang lebih besar untuk mengendalikan pembelajaran mereka sendiri.

Pengajaran yang berpusat pada peserta didik mempromosikan pembelajaran untuk pemahaman melalui kolaborasi dan refleksi. Beberapa contoh strategi yang berpusat pada peserta didik termasuk pembelajaran kelompok kecil kolaboratif, pembelajaran berbasis inkuiri, pembelajaran pengalaman, pembelajaran layanan, dan pembelajaran berbasis tempat.

Ke empat yaitu fokus pada masalah dunia nyata yang bermakna yang memiliki relevansi dalam kehidupan anak-anak. Libatkan siswa dalam pembelajaran yang terjadi



di luar lingkungan kelas dengan sengaja melibatkan masyarakat. Bantu siswa membuat koneksi kurikuler dari peristiwa yang terjadi di komunitas dan kehidupan mereka sendiri.

Imbaulah siswa untuk menyelidiki komunitas, keluarga, dan budaya mereka serta menciptakan kondisi yang memungkinkan mereka untuk melihat bahwa situasi dan cara mereka sendiri untuk mengetahui sama relevan dan bermakna seperti yang terjadi di komunitas lain atau di seluruh dunia. Imbaulah siswa untuk mengeksplorasi aspek budaya dan identitas mereka sendiri dan untuk menemukan cara untuk menerapkan pengetahuan berbasis budaya untuk tantangan dunia nyata. Imbaulah siswa untuk menjelajahi sejarah pribadi dan keluarga sebagai bagian normal dari penyelidikan yang lebih dalam terhadap identitas mereka sendiri. Dukung siswa untuk merasa nyaman dengan kompleksitas dan ambiguitas dalam berbagai konteks. Misalnya, membantu siswa mengenali dan merangkul kompleksitas dalam konteks identitas, budaya, dan keanggotaan dalam kelompok yang berbeda dapat membimbing mereka untuk melihat bahwa kehidupan penuh dengan ambiguitas dan kompleksitas yang tidak memungkinkan mereka untuk mendeskripsikan atau menyelesaikannya dengan mudah.

Salah satu cara guru dapat membantu siswa menjadi lebih baik dalam menghadapi tantangan yang tidak cocok dengan solusi yang rapi adalah dengan memasukkan contoh dunia nyata dari masalah dalam kurikulum dan kemudian memodelkan pemikiran dan pengambilan keputusan yang terlibat dalam mengatasi tantangan yang dihadapi.

Kelima, libatkan siswa dalam pemikiran kritis dan pemikiran reflektif. Berikan kesempatan reguler dan sistematis bagi siswa untuk mempraktikkan komponen pemikiran kritis dalam berbagai konteks, termasuk area konten tradisional serta konteks yang lebih luas terkait dengan tantangan keberlanjutan. Jadikan berpikir kritis sebagai bagian rutin dari iklim kelas sehingga siswa melihat pemikiran kritis sebagai praktik sehari-hari.

Tetapkan rutinitas dan protokol yang membantu siswa menantang dan mengklarifikasi asumsi, membantah masalah dengan bukti yang mendukung, merefleksikan bias mereka sendiri, tidak setuju dengan hormat dan konstruktif, dan bergulat dengan dilema yang menantang. Modelkan pemikiran kritis dan buat pemikiran guru terlihat oleh siswa dalam praktik profesional harian. Bantu siswa juga melihat betapa pemikiran kritis merupakan komponen pandangan dunia keberlanjutan.

Pelajari cara mengajukan pertanyaan yang menantang dan membangkitkan pikiran yang menjadi model pemikiran kritis untuk memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih berpikir kritis. Berikan umpan balik yang konstruktif dan mendukung bagi siswa ketika mereka berlatih berpikir kritis dalam berbagai konteks.

Terakhir, bantu siswa mengembangkan rasa keefektifan dan agensi mereka. Agensi mengacu pada kemampuan individu untuk membuat pilihan dan bertindak secara efektif untuk menghasilkan efek yang diinginkan. Untuk menerapkan pandangan dunia keberlanjutan, siswa perlu tahu apa yang perlu dilakukan, tahu bagaimana melakukannya, dan memiliki kemampuan untuk bertindak dengan cara yang memiliki dampak yang berarti. Kepercayaan pada kapasitas sendiri untuk mengatur dan melaksanakan tindakan

sering disebut sebagai *self-efficacy* (Taylor et al., 2019). Orang-orang mengembangkan *self-efficacy* dengan memiliki kesempatan untuk belajar bagaimana melakukan tugas dengan sukses; dengan melihat orang lain berhasil menyelesaikan tugas; dengan menerima pesan positif, dorongan, dan ceramah; dan dengan mempelajari cara meminimalkan stres dan meningkatkan suasana hati seseorang ketika menghadapi tugas yang sulit atau menantang.

Namun, pendidikan untuk keberlanjutan memberdayakan kaum muda untuk mengatasi ketidakadilan sosial, ekonomi, dan lingkungan yang menciptakan penderitaan di seluruh dunia saat ini. Dengan menerapkan strategi yang membantu siswa untuk mengembangkan kompetensi budaya dan pandangan dunia keberlanjutan, guru dapat membantu mereka menemukan solusi nyata untuk tantangan kompleks yang mereka hadapi saat ini dan yang akan mereka hadapi di masa depan.

### **Kebijakan Pendidikan dalam Mendukung SDGs Jepang**

Mengutip dari *website Ministry of Foreign Affairs of Japan* dalam dokumen *Japan's Voluntary National Review : Report on the Implementation of the Sustainable Development Goals*, Jepang sangat menjunjung tinggi SDGs pendidikan berkualitas, hal tersebut dibuktikan melalui diberlakukannya pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi dan juga membentuk skema beasiswa jenis hibah untuk memperluas bantuan ekonomi, itu bertujuan untuk mengurangi beban biaya pendidikan bagi siswa di Jepang. Selain itu, Jepang juga sudah melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan kebutuhan khusus untuk anak-anak penyandang cacat dan juga untuk mempromosikan pendidikan dan pelajaran untuk kesetaraan gender (Ministry of Foreign Affairs of Japan, 2017).

Sejalan dengan Rencana Implementasi Nasional *Sustainable Development Goals Education* dan Undang-Undang tentang Promosi Kegiatan Konservasi Lingkungan melalui pendidikan lingkungan, Jepang telah memperkuat kerja sama di antara banyak pemangku kepentingan yang terlibat sehingga dapat menyediakan pendidikan yang cocok untuk orang-orang di rumah, sekolah, tempat kerja, komunitas lokal, dan lokasi lain sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Dalam rangka meningkatkan kompetensi anak-anak untuk menjadi pencipta masyarakat yang berkelanjutan, Jepang akan mempromosikan pendidikan terkait SDGs dengan meningkatkan kurikulum dan merevisi bahan ajar di sekolah sesuai dengan standar kurikulum nasional baru yang telah diterapkan mulai April 2020 tahun lalu.

### **Finlandia**

Berdasarkan laporan yang diberikan oleh Anttila (2014) selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Finlandia dalam *World Conference on Education for Sustainable Development*, SDGs pendidikan berkualitas telah dilaksanakan di Finlandia melalui berbagai kegiatan yang melibatkan berbagai aktor dan dijadikan inspirasi untuk merancang kerangka kerja strategis nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diintegrasikan



dalam kebijakan dan program nasional yang relevan. Tujuannya yaitu untuk diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari lembaga pendidikan dan masyarakat luas.

Di Finlandia, pendidikan dasar terdiri dari sembilan tahun pendidikan wajib yang disediakan gratis untuk seluruh kelompok umur di sekolah-sekolah komprehensif. Hampir semua anak menyelesaikan sekolah wajib mereka, yang mana hal tersebut menjadikan ruang kelas sebagai contoh yang baik bagi seluruh masyarakat dalam skala mini, menawarkan lingkungan belajar yang inklusif untuk semua siswa.

Kurikulum inti nasional untuk pendidikan dasar adalah instrumen panduan yang sangat penting untuk mendukung SDGs. Tujuan utama (untuk mata pelajaran yang penting dalam hal budaya dan masyarakat) dan distribusi jam pelajaran antara mata pelajaran dalam pendidikan dasar ditentukan oleh keputusan pemerintah. Dewan Pendidikan Nasional Finlandia merumuskan kurikulum inti nasional untuk pendidikan dasar berdasarkan keputusan pemerintah.

Kurikulum inti tahun 2006 mencakup tujuan dan isi inti dari berbagai mata pelajaran, serta prinsip penilaian murid, pendidikan kebutuhan khusus, kesejahteraan murid dan bimbingan pendidikan. Penyedia pendidikan, biasanya otoritas pendidikan lokal dan sekolah sendiri, menyusun kurikulum mereka sendiri untuk pendidikan dasar dalam kerangka kurikulum inti nasional.

SDGs telah menjadi salah satu dari tujuh topik yang ditekankan dalam kurikulum inti untuk pendidikan dasar sejak tahun 2006. Kurikulum 2006 mengalami revisi dan versi baru berlaku pada tahun 2016. Pada kurikulum 2016 ada lebih banyak penekanan pada SDGs. Kebutuhan akan cara hidup yang berkelanjutan dan pemahaman eko-sosial akan ditekankan dalam basis nilai pendidikan. Budaya kerja semua sekolah diharapkan untuk dikembangkan sehingga sekolah itu sendiri adalah komunitas pembelajaran yang menunjukkan tanggung jawab untuk lingkungan dan orientasi masa depan. Tujuan dan sasaran pendidikan ditentukan untuk kompetensi transversal dan untuk kompetensi berbasis subjek. Salah satu dari tujuh bidang kompetensi transversal digambarkan sebagai “Partisipasi, pengaruh dan membangun masa depan yang berkelanjutan”. Ini dimasukkan dalam semua mata pelajaran sehingga setiap mata pelajaran dapat mempromosikan kompetensi ini di bidangnya masing-masing. Tujuannya adalah untuk mendukung semua siswa untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan sikap mereka, yang mempromosikan kemampuan mereka untuk memahami pentingnya masa depan yang berkelanjutan dan untuk bertindak sebagai warga negara yang bertanggung jawab dari perspektif individu, lokal, dan global.

### **China**

Garis Besar Pendidikan Nasional Cina tahun 2010-2020 memandang pendidikan berkualitas sebagai tema strategis untuk reformasi dan pengembangan pendidikannya, hal itu juga menunjukkan tujuan reformasi pendidikan di Cina yaitu mempromosikan akses



pendidikan yang setara, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya. Para ahli di Komite Nasional mengaitkan komponen- komponen pendidikan berkualitas dalam SDGs dengan strategi pendidikan nasional dan mengadvokasi SDGs pendidikan berkualitas sebagai cara untuk pendidikan berkualitas (Han, 2015).

Untuk mendukung hal tersebut, Cina berfokus pada pengembangan pengetahuan, nilai, sikap, dan perubahan perilaku siswa. Kebijakan dan proyek yang dilakukan berupaya untuk mengarahkan fungsi pendidikan menuju sumber daya masyarakat dan individu, dan menumbuhkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, seperti pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan kepemimpinan dan komunikasi, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, dan kompetensi pada inovasi sosial dan teknologi (Han, 2015)

Hal lain yang dilakukan oleh Cina yaitu dengan membangun Kota Beijing sebagai kota pembelajaran. Pada tahun 2007, Komite Partai Kotamadya Beijing dan Pemerintah Kota mengumumkan secara resmi Keputusan tentang Pembangunan Gedung Pembelajaran di Beijing, yang mengklarifikasi tujuan dan tugas membangun kota belajar di Beijing yaitu: 1) mempercepat pembentukan sistem pendidikan seumur hidup ibu kota dan sistem layanan pembelajaran seumur hidup; 2) pembentukan organisasi pembelajaran; memperkuat kepemimpinan; 3) meningkatkan mekanisme perlindungan untuk membangun kota pembelajaran. Kota pembelajaran juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan belajar bagi semua penduduk dan mempromosikan pembangunan. Gagasan membangun kota belajar didukung dengan baik melalui pembuatan kebijakan, penelitian dan praktik di Cina dan tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga di sektor masyarakat lainnya. Upaya untuk membangun kota pembelajaran di Beijing telah mencapai hasil yang luar biasa dan menyajikannya dengan karakteristik yang unik (Yuan et al., 2019).

Pada Oktober 2013, Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), Kementerian Pendidikan Cina, dan Pemerintah Rakyat Kota Beijing bersama-sama mengadakan Konferensi Kota Pembelajaran Internasional pertama di Beijing. Pertemuan tersebut menghasilkan dua dokumen penting, Deklarasi Beijing tentang Kota Belajar dan Fitur Utama Kota Belajar, memberikan kerangka kerja yang komprehensif dan poin-poin penting untuk membangun kota pembelajaran di semua negara dan wilayah di dunia. Sistem indeks kota pembelajaran juga menyediakan alat untuk mengukur kemajuan dan tingkat implementasi kota pembelajaran (Yuan et al., 2019).

## **Indonesia**

Penerapan SDGs pendidikan berkualitas di Indonesia salah satunya dapat dilihat di Yogyakarta. Dikutip dari *website* Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Yogyakarta ([bappeda.jogjapro.go.id](http://bappeda.jogjapro.go.id)) dalam rangka mencapai SDGs ke 4 telah disusun beberapa target yang terdiri dari: 1) menjamin akses pengasuhan anak usia dini, pendidikan dasar

dan menengah, serta pendidikan kejuruan termasuk universitas yang terjangkau dan berkualitas; 2) menghilangkan disparitas gender; 3) membangun dan meningkatkan fasilitas pendidikan yang ramah anak; dan 4) meningkatkan jumlah guru berkualitas. Target tersebut didasarkan pada strategi meningkatkan kualitas manajemen dan pelayanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan dengan arah kebijakan: 1) peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan; 2) peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan; 3) peningkatan layanan pendidikan; dan 4) memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, 2021).

Untuk mencapai target tersebut diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah maupun nonpemerintah, upaya-upaya tersebut dituangkan dalam program dan kegiatan, antara lain program-program terkait: 1) peningkatan kualitas dan akses pendidikan dasar dan menengah; 2) peningkatan akses, kualitas relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; 3) peningkatan akses dan kualitas pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 4) penilaian mutu satuan pendidikan; 5) peningkatan kapasitas dosen, guru, dan tenaga kependidikan; 6) penyediaan/pemberian bantuan pendidikan untuk penduduk; 7) pengembangan dan pembinaan, dan perlindungan bahasa; dan 8) peningkatan kualitas kelembagaan, tata kelola, dan layanan pendidikan.

### **Solusi untuk Kebijakan Pendidikan di Indonesia**

Setelah mengetahui kebijakan pendidikan di Indonesia yang berkaitan dengan SDGs pendidikan berkualitas hanya baru ada di Provinsi Jogjakarta, solusi yang dapat diberikan yaitu sebaiknya provinsi lain yang ada di Indonesia juga dapat menerapkannya dengan mencontoh dari Provinsi Jogjakarta. Pemerintah juga bisa mencontoh dari kebijakan negara lain, kebijakan yang dapat di terapkan di Indonesia salah satunya yaitu menumbuhkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, seperti pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan kepemimpinan dan komunikasi, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, dan kompetensi pada inovasi sosial dan teknologi seperti yang dilakukan di negara Cina, karena hal tersebut sangat dibutuhkan oleh pelajar yang ada di Indonesia untuk mendukung keterampilannya di era saat ini.

## **IV. SIMPULAN**

Penerapan SDGs pendidikan berkualitas di berbagai negara dapat dilihat melalui kebijakan pendidikannya. Di Jepang dibuktikan dengan diberlakukannya pendidikan gratis dari pendidikan anak usia dini hingga pendidikan tinggi, lalu Jepang juga melakukan upaya untuk meningkatkan pendidikan kebutuhan khusus untuk anak-anak penyandang cacat dan juga untuk mempromosikan pendidikan dan pelajaran untuk kesetaraan gender. Jepang juga akan mempromosikan pendidikan terkait SDGs dengan meningkatkan kurikulum dan merevisi bahan ajar di sekolah sesuai dengan standar kurikulum nasional baru. Di Finlandia, SDGs telah menjadi salah satu dari tujuh topik



yang ditekankan dalam kurikulum inti untuk pendidikan dasar. Pada kurikulum 2016 menekankan pada kebutuhan akan cara hidup yang berkelanjutan dan pemahaman ekososial, dan juga akan mengembangkan budaya sekolah sebagai komunitas pembelajaran yang menunjukkan tanggung jawab untuk lingkungan dan orientasi masa depan. Tujuan dan sasaran pendidikan ditentukan untuk kompetensi transversal dan untuk kompetensi berbasis subjek. Sedangkan Cina memandang pendidikan berkualitas sebagai tema strategis untuk reformasi dan pengembangan pendidikannya karena hal tersebut menunjukkan tujuan reformasi pendidikan di Cina yaitu mempromosikan akses pendidikan yang setara, meningkatkan kualitas pendidikan dan meningkatkan kapasitas sumber daya. Untuk mendukung hal tersebut, Cina berfokus pada pengembangan pengetahuan, nilai, sikap, dan perubahan perilaku siswa. Kebijakan dan proyek yang dilakukan berupaya untuk mengarahkan fungsi pendidikan menuju sumber daya masyarakat dan individu, dan menumbuhkan kualitas pendidikan kewarganegaraan, seperti pemikiran kritis, kemampuan memecahkan masalah, keterampilan kepemimpinan dan komunikasi, pengambilan keputusan dalam kondisi ketidakpastian, dan kompetensi pada inovasi sosial dan teknologi. Hal lain yang dilakukan Cina yaitu dengan membangun Kota Beijing sebagai kota pembelajaran. Di Indonesia, penerapan SDGs pendidikan berkualitas dapat dilihat di Provinsi Jogjakarta. Dalam rangka mencapai hal tersebut telah disusun target-target dengan arah kebijakan peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas pendidik dan sarana pendukung pendidikan, peningkatan layanan pendidikan, dan memperkuat dan mengembangkan pendidikan karakter.

## DAFTAR PUSTAKA

- Álvarez-Otero, J., & de Lázaro y Torres, M. L. (2018). Education in sustainable development goals using the spatial data infrastructures and the TPACK model. *Education Sciences*, 8(4), 1–14. <https://doi.org/10.3390/educsci8040171>
- Anttila, K. (2014). Education for sustainable development-best practices from Finland. In *UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development*, 10–12.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY. (2021). *Sustainable Development Goals; Pendidikan Bermutu*. Bappeda.Jogjaprov.Go.Id. <http://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku/sdgs/detail/4-pendidikan-bermutu>
- Bell, L., & Stevenson, H. (2006). Education policy: Process, themes and impact. *Education Policy: Process, Themes and Impact*, 1–192. <https://doi.org/10.4324/9780203088579>
- Boeren, E. (2019). Understanding Sustainable Development Goal (SDG) 4 on “quality education” from micro, meso and macro perspectives. *International Review of Education*, 65(2), 277–294. <https://doi.org/10.1007/s11159-019-09772-7>
- Bolton, M. (2021). Public sector understanding of sustainable development and the sustainable development goals: A case study of Victoria, Australia. *Current Research in Environmental Sustainability*, 3, 100056.





- <https://doi.org/10.1016/j.crsust.2021.100056>
- Han, Q. (2015). Education for Sustainable Development and Climate Change Education in China: A Status Report. *Journal of Education for Sustainable Development*, 9(1), 62–77. <https://doi.org/10.1177/0973408215569114>
- Jie, N. D. (2016). Towards A Framework of Education Policy Analysis. *The HEAD Foundation*.  
[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=0%2C5&q=Jie%2C+N.+D.%2C+2016.+Towards+A+Framework+of+Education+Policy+Analysis.+s.l.%3AThe+Head+Foundation.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=0%2C5&q=Jie%2C+N.+D.%2C+2016.+Towards+A+Framework+of+Education+Policy+Analysis.+s.l.%3AThe+Head+Foundation.&btnG=)
- Kothari, C. (2004). Research methodology: methods and techniques. In *New Age International* (Second Rev). New Age International Publisher.  
<https://doi.org/http://196.29.172.66:8080/jspui/bitstream/123456789/2574/1/Research%20Methodology.pdf>
- Ministry of Foreign Affairs of Japan. (2017). *Japan's Voluntary National Review : Report on the Implementation of the Sustainable Development Goals*.
- Nolet, V. (2017). Quality education: Cultural competence and a sustainability worldview. *Kappa Delta Pi Record*, 53(4), 162–167.  
<https://doi.org/10.1080/00228958.2017.1369276>
- Schinkel, A., De Ruyter, D. J., & Aviram, A. (2016). Education and Life's Meaning. *Journal of Philosophy of Education*, 50(3), 398–418. <https://doi.org/10.1111/1467-9752.12146>
- Taylor, N., Quinn, F., Jenkins, K., Miller-Brown, H., Rizk, N., Prodromou, T., Serow, P., & Taylor, S. (2019). Education for Sustainability in the Secondary Sector—A Review. *Journal of Education for Sustainable Development*, 13(1), 102–122.  
<https://doi.org/10.1177/0973408219846675>
- Tirri, K., Moran, S., & Menon Mariano, J. (2016). Education for purposeful teaching around the world. *Journal of Education for Teaching*, 42(5), 526–531.  
<https://doi.org/10.1080/02607476.2016.1226551>
- United Nations. (2021). *Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all*. Sustainabledevelopment.Un.Org.  
<https://sdgs.un.org/goals/goal4>
- UU RI No 20 Thn 2003. (2003). Sistem Pendidikan Nasional. *Republik Indonesia*, 159–170.
- Viennet, R and Pont, B. (2017). Education Policy Implementation. *OECD Education Working Papers Series*, 162, 375.
- Williams, C. (2007). Research methods. *Journal of Business & Economic Research*, 5(3), 65–72. <https://doi.org/10.1017/9781108656184.003>
- Yuan, D., Gui, M., & Shen, X. (2019). Building a Learning City for Sustainable Development: Spotlight on Beijing, China. *New Directions for Adult and Continuing Education*, 2019(162), 37–48. <https://doi.org/10.1002/ace.20324>